



Transformasi Trans-Pacific Partnership: Peran Jepang Setelah Penarikan Diri Amerika Serikat

Muhammad Badry Muntasyir^{1✉}, Gili Argenti², Nurbani Adine Gustianti³, Fadhlan Nur Hakiem⁴

Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: 2010631260033@student.unsika.ac.id^{1✉}

Abstrak

Trans-Pacific Partnership (TPP) adalah sebuah perjanjian kerja sama perdagangan bebas yang beranggotakan 12 negara. Menjadi perjanjian kerja sama dagang terbesar ketiga di dunia, TPP merepresentasikan 13.5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) global. Sayangnya, Amerika Serikat (AS) yang merupakan anggota berpengaruh memutuskan untuk hengkang pada 2017. Kekosongan kepemimpinan dalam TPP menjadi suatu tantangan tersendiri bagi negara-negara anggota yang tersisa untuk tetap menjalankan blok perdagangan bebas tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan data sekunder yang berasal dari berbagai literatur, penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi peran Jepang dalam mengisi kekosongan kepemimpinan di TPP pasca penarikan diri AS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jepang memainkan peran signifikan sebagai aktor utama yang menginisiasi revolusi TPP menjadi CPTPP, hingga kesepakatan tersebut diratifikasi oleh sepuluh dari sebelas negara anggota. Jepang juga menjadikan CPTPP sebagai tameng untuk melawan hegemoni China di Asia Pasifik dengan mengupayakan CPTPP sebagai kiblat kekuatan ekonomi terdepan di kawasan.

Kata Kunci : *CPTPP, kesepakatan perdagangan bebas, peran Jepang, TPP*

Abstract

The Trans-Pacific Partnership (TPP) is a free trade agreement consisting of 12 countries. Being the world's third largest trade agreement, TPP represents 13.5% of global GDP. Unfortunately, the United States as a key-driver member withdrew in 2017. The leadership vacuum in the TPP is a challenge for the remaining member countries to continue running the free trade bloc. By using qualitative research methods and secondary data, this study aims to investigate Japan's role in filling the leadership vacuum in the TPP following the United States' withdrawal. The results of the study show that Japan played a significant role as the main actor by initiating the TPP revolution to become the CPTPP, until the agreement was ratified by ten out of eleven member countries. Japan has also made CPTPP a shield against China's hegemony in the Asia Pacific by making CPTPP the center of the leading economic power in the region.

Keyword: *CPTPP, free trade agreement, Japan's role, TPP*

PENDAHULUAN

Trans-Pacific Partnership (TPP) adalah kesepakatan perdagangan bebas (*Free Trade Agreement*) yang didirikan pada tahun 2008. Dibentuk atas dasar kekecewaan banyak negara terhadap perjanjian *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC) yang dianggap stagnan (Kunaifi, 2018), TPP awalnya terdiri atas 12 negara. Selusin negara tersebut adalah Amerika Serikat (AS), Australia, Brunei Darussalam, Chili, Jepang, Kanada, Malaysia, Meksiko, Peru, Selandia Baru, Singapura, dan Vietnam. TPP adalah perjanjian mengikat (*binding agreement*) yang bertujuan untuk menghilangkan hingga 0% tarif pada perdagangan barang dan jasa, serta meregulasi peraturan tentang berbagai masalah, termasuk hak kekayaan intelektual dan investasi asing. Dalam TPP, sanksi keuangan dapat dikenakan pada negara anggota yang melanggar perjanjian (Triana, 2019).

Salah satu momentum yang akan sangat diingat dari TPP adalah penarikan diri AS dari perjanjian perdagangan multilateral tersebut pada 23 Januari 2017, tak lama setelah terpilihnya Presiden Donald John Trump. Justifikasi Trump untuk menarik diri dari TPP adalah sebagai bentuk implementasi dari pendekatan "*America First*." Trump beranggapan bahwa TPP adalah kesepakatan "konyol" karena menyebabkan banyak perusahaan hengkang dari AS. Trump juga bermaksud untuk melindungi pekerja AS dari persaingan dengan negara-negara anggota TPP yang berupah rendah seperti Vietnam dan Malaysia. Ia menambahkan bahwa pada masa kepemimpinannya, AS hanya akan menandatangani kesepakatan perdagangan secara bilateral dengan sekutu individu. Dengan harapan, kebijakan ini akan membuat banyak perusahaan kembali ke AS (Baker, 2017). Sebelas negara anggota TPP lainnya—terutama Jepang, Vietnam, dan Malaysia—sangat kecewa dengan keputusan AS. Meskipun demikian, bagi Jepang, TPP tetaplah "geng" yang layak dipertahankan terlepas dari hengkangnya AS selaku mitra dagang utamanya. Setelah AS mencampakkan TPP,

Jepang semakin aktif mendukung perjanjian tersebut dan menjadi lebih terbuka untuk perdagangan bebas berkat dukungan dari sesama negara anggota (Aziz, 2019).

Terdapat banyak literatur tentang TPP dan dirujuk oleh penulis berdasarkan relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan. Namun, literatur-literatur tersebut belum ada yang secara spesifik membahas tentang peran Jepang dalam TPP pasca hengkangnya AS. Tinjauan Pustaka yang penulis lakukan akan menjadi komparasi dan landasan teori yang digunakan. Pada akhirnya, tinjauan pustaka akan menegaskan *"State of the Art"* penelitian ini dengan mengidentifikasi pengetahuan terdahulu tentang TPP melalui narasi komparatif yang memperkuat argumentasi penelitian, serta memverifikasi dan menjustifikasi pengetahuan baru yang penulis produksi.

Dalam naskah prosiding berjudul *"The Trans-Pacific Partnership: Positive and Negative Impacts"*, Martin Holub (2018) menyatakan bahwa para pakar masih berselisih pendapat tentang apakah TPP akan secara dominan berdampak positif atau negatif bagi dinamika hubungan internasional. Mempresentasikan artikelnya dalam *International Conference on European Integration*, Holub menyatakan bahwa China memiliki urgensi untuk memantau perkembangan TPP dan membangun komunitas ekonominya di wilayah tersebut. Setelah penarikan diri AS, China berkemungkinan untuk melirik TPP dan mempertimbangkan apakah akan bergabung dengan perjanjian tersebut. Lalu, bagi ASEAN, TPP bisa menjadi alternatif yang cocok untuk masyarakat ekonomi regional yang dipimpin China.

Daisuke Akimoto (2019) dalam artikelnya yang berjudul *"Japan's Policy on the Trans-Pacific Partnership (TPP) in Light of IR Theory and Analytical Eclecticism"* menjelaskan secara teoretis bahwa kebijakan Jepang terhadap TPP telah menjadi kontroversi di tingkat politik, akademik, dan publik. Perdebatan domestik tentang TPP benar-benar memecah opini publik di Jepang serta memicu pro dan kontra di kalangan akademisi. Artikel yang terpublikasi di *Journal of International and Global Studies* ini menerangkan bahwa alasan Jepang tetap mendukung dan memfasilitasi TPP bahkan setelah penarikan AS adalah untuk mendukung perdagangan bebas, mencapai integrasi regional berdasarkan kerja sama internasional, serta mencapai kepentingan nasional dan kepentingan strategis. Meskipun AS pada 2017 telah memisahkan diri dari TPP, Jepang menilai bahwa TPP tetap penting dalam sistem perdagangan bebas internasional, dan diharapkan negara-negara Asia Pasifik lainnya akan berusaha untuk berpartisipasi dalam perjanjian tersebut di masa mendatang.

Penelitian ketiga karya Junju Nakagawa (2022) yang berjudul *"Japan-US Trade War Under the Trump Administration: From the US Withdrawal from the TPP to the Japan-US Trade Agreement"* menyatakan bahwa penarikan AS dari TPP menandai dimulainya era baru dalam hubungan perdagangan Jepang-AS. Melalui penelitian yang dikurasi dalam buku

berjudul *Research Handbook on Trade Wars* ini, Junju Nakagawa menyebut bahwa hubungan dagang antara Jepang-AS dapat berubah menjadi perang dagang bilateral jika kedua negara tidak dapat mencapai kesepakatan. Dalam kasus ini, Jepang mengharapkan AS kembali bergabung dengan TPP, sedangkan AS lebih menyukai kesepakatan bilateral. Kebuntuan ini membuat kedua pemerintah "bertempur" selama beberapa tahap negosiasi perdagangan, mulai dari *Japan-US Economic Dialogue* pada April 2017 hingga *Japan-US Free, Fair and Reciprocal Trade Talks* pada April 2018, dan juga negosiasi *Japan-US Trade Agreement* dari April hingga September 2019.

Dibandingkan dengan literatur-literatur di atas, penelitian ini memiliki substansi yang berbeda dan mengandung pengembangan pembahasan pada bagaimana peran Jepang dalam forum TPP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Jepang dalam TPP pasca penarikan diri AS, yang tentunya akan mengakibatkan kekosongan peran kepemimpinan dalam perjanjian tersebut. Sebagai salah satu raksasa ekonomi Asia, status keanggotaan Jepang di TPP memantik tanda tanya mengenai peran sentral "*Land of the Rising Sun*" tersebut dalam menjalankan strategi untuk memainkan peran kepemimpinannya. Dengan mengambil periode pasca penarikan diri AS dari TPP, penulis memfokuskan kajiannya pada rentang waktu empat tahun, terhitung sejak 2017 hingga 2021 pada akhir era kepemimpinan Shinzo Abe.

Penulis optimis penelitian ini mampu berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan dengan menyuguhkan perspektif baru dalam meninjau manuver kebijakan luar negeri negara-negara anggota TPP, terutama Jepang. Jika selama ini Jepang dan AS dikenal sebagai sekutu, pada penelitian ini pembaca akan melihat bahwa kedua negara memiliki pandangan berseberangan tentang masa depan kerja sama perdagangan ini. Hengkangnya AS dari TPP pada era kepemimpinan Donald Trump juga menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri suatu negara dapat berubah seiring bergantinya kepemimpinan domestik negara bersangkutan. Selain itu, penelitian ini juga dapat bermanfaat sebagai kaca mata pembesar dalam mengamati sedikit banyaknya peran kepemimpinan yang Jepang ambil alih demi keberlanjutan TPP sebagai blok perdagangan multilateral.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang penulis susun merupakan penelitian kualitatif. Dikutip dari Creswell (2017), penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Adapun metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan mempelajari berbagai literatur

melalui proses pencarian, pengumpulan, dan pengolahan dokumen dengan kata kunci *Trans-Pacific Partnership* dari berbagai sumber kepustakaan dan karya ilmiah penelitian terdahulu. Peneliti sebagai subjek penelitian berperan dalam pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dengan sangat memperhatikan proses dan makna dari objek yang diteliti, yakni kebijakan luar negeri Jepang dalam kerangka kerja TPP.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari berbagai buku, artikel ilmiah, laman resmi pemerintahan atau organisasi, dan literatur dari berbagai media online yang kredibel (Melfianora, 2019). Sistem penapisan pustaka dilakukan dengan menyeleksi sumber-sumber yang didapat berdasarkan tingkat kredibilitasnya. Sumber-sumber literatur ditapis berdasarkan rentang waktu publikasinya yang dimutakhirkan selama sepuluh tahun ke belakang untuk buku dan lima tahun ke belakang untuk artikel jurnal. Sebagai penyempurna referensi, sumber *online* ditapis berdasarkan penerbit yang diprioritaskan dari laman resmi pemerintahan, kementerian, lembaga pemerintah, atau laman media besar ternama.

Berbagai data yang didapat kemudian dianalisis secara sistematis melalui empat tahap, yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penulis mereduksi data-data yang telah terkumpul dengan cara menyederhanakan, menggolongkan, dan membuang data yang tidak perlu sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang relevan. Kemudian, dalam tahap penyajian (*display*) data, sekumpulan data disusun secara sistematis agar mudah dipahami dan menghasilkan kesimpulan yang mampu diverifikasi. Tahap pengambilan kesimpulan dan verifikasi dilakukan dengan cara mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan hasil penelitian sebagai jawaban dari permasalahan yang ada (Sugiyono, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari TPP ke CPTPP: Sebuah Transformasi yang Digagas oleh Jepang

Perjanjian TPP awalnya beranggotakan 12 negara Asia-Pasifik (TPP12), di dalamnya termasuk AS, Australia, Brunei Darussalam, Chili, Jepang, Kanada, Malaysia, Meksiko, Peru, Selandia Baru, Singapura, dan Vietnam. Namun, pada November 2016, dengan kemenangan elektoral Presiden AS Donald Trump yang dikenal sebagai seorang advokat anti-TPP, harapan untuk keanggotaan AS di TPP kian jauh dari kata mungkin. Bahkan saat masih berkampanye dalam pemilihan presiden, Trump kerap mencela berbagai kesepakatan perdagangan internasional yang diikuti oleh AS selama tiga dekade terakhir (Smith, 2017).

Dalam hemat Trump, perjanjian-perjanjian tersebut adalah penyebab dari menurunnya upah dan hilangnya lapangan pekerjaan di AS. Sebagaimana dilansir dari

Komisi Perdagangan Internasional AS (*US International Trade Commission*), Produk Domestik Bruto (PDB) AS diprediksi akan meningkat sebesar 0,15 persen pada tahun 2032 di bawah TPP. Namun, TPP di saat yang bersamaan juga berpotensi akan merugikan berbagai sektor industri di AS, antara lain industri elektronik, farmasi, kulit, dan titanium. Prediksi lain menuturkan bahwa selama sepuluh tahun ke depan, sekitar 169.000 pekerja AS setiap tahunnya terancam kehilangan mata pencaharian mereka. Tak mengejutkan, AS akhirnya memutuskan untuk keluar dari TPP tepatnya pada 23 Januari 2017 (Mui, 2017).



Gambar 1. Visualisasi negara-negara anggota CPTPP

Sumber: (Vietnam Investment Review, 2018).

Namun demikian, Jepang di bawah administrasi Shinzo Abe telah menjadikan TPP sebagai salah satu fokus utama kebijakan perdagangan bebasnya. Meski penelitian terdahulu dari Hagström (2015) menyebutkan bahwa Jepang adalah negara merkantilis dengan naluri kepemimpinan yang pasif, kita dapat melihat Jepang mulai membangun citra positif kepemimpinannya dalam forum kerja sama dagang. Optimisme ini bisa pernah disampaikan oleh Solís dan Katada (2015), yang menyampaikan bahwa Jepang dapat memengaruhi TPP dengan cara tertentu. Bahkan, meskipun terkesan bias, Hosuk (2018) beranggapan bahwa Jepang sudah menggeser posisi Eropa sebagai "pemimpin baru perdagangan bebas."

Melihat realita di TPP, aspek paling signifikan yang mencerminkan peran kepemimpinan Jepang adalah pengaruhnya dalam meneruskan negosiasi. Dalam serangkaian pertemuan bilateral dengan para pemimpin negara anggota TPP, Abe menekankan pentingnya perombakan TPP menjadi sebuah kesepakatan baru (González,

2019). Alhasil, dorongan dari Jepang untuk membentuk perjanjian alternatif pasca keluarnya AS telah membawa sebelas negara yang tersisa sepakat untuk memodifikasi TPP menjadi *Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership* (CPTPP). Diwacanakan sejak 10 November 2017 di Da Nang, Vietnam, tak berselang lama setelah itu CPTPP akhirnya resmi ditandatangani oleh para negara anggota di Santiago, Chili, pada 8 Maret 2018 (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, 2021). Sampai artikel ini ditulis, total sudah ada 10 negara anggota CPTPP yang telah meratifikasi perjanjian tersebut. Terhitung hanya ada satu anggota—Brunei Darussalam—yang belum meratifikasi CPTPP, sehingga CPTPP belum sepenuhnya berlaku secara resmi di negara tersebut. Berikut adalah tabel berisi daftar negara-negara yang sudah meratifikasi CPTPP yang disadur dari berbagai sumber.

Tabel 1. Daftar negara-negara yang sudah meratifikasi CPTPP

Nomor	Negara	Tanggal Ratifikasi
1.	Meksiko	28 Juni 2018
2.	Jepang	6 Juli 2018
3.	Singapura	19 Juli 2018
4.	Selandia Baru	25 Oktober 2018
5.	Kanada	27 Oktober 2018
6.	Australia	30 Oktober 2018
7.	Vietnam	12 November 2018
8.	Peru	14 Juli 2021
9.	Malaysia	30 September 2022
10	Chili	23 Desember 2022

Sumber: (González, 2019; Latin America News, 2021; Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade, 2021; Wahab, 2022; NHK World-Japan, 2022).

Meski tanpa AS di dalamnya, CPTPP adalah salah satu perjanjian perdagangan bebas multilateral terbesar ketiga di dunia, setelah Pasar Tunggal Eropa (*European Single Market*) dan *North America Free Trade Agreement* (NAFTA). Secara keseluruhan, CPTPP merepresentasikan 13,5 persen dari PDB global (Goodman, 2018; González, 2019). Itulah mengapa, alih-alih pasrah setelah AS keluar, negara-negara anggota yang tersisa justru mentransformasi TPP menjadi sebuah perjanjian baru yang kini acap disebut CPTPP atau TPP11. Di sini, Jepang memainkan peran sentral untuk mengisi kekosongan inklusivitas AS. Keseriusan Jepang dapat terlihat dari pernyataan Menteri Negara Kebijakan Ekonomi dan Fiskal Jepang, Toshimitsu Motegi, dalam *Bloomberg The Year Ahead summit in Tokyo* 2018.

Pada kesempatan tersebut, Motegi dengan optimistis mengatakan bahwa Jepang telah berperan sebagai salah satu pemain utama dalam sistem perdagangan internasional. Dalam era baru TPP yang kini berevolusi menjadi CPTPP, Motegi menegaskan bahwa Jepang akan menjadi pemimpin geng perdagangan tersebut dengan menginisiasi pembentukan aturan baru (*new rules*). Bahkan, sang Menteri menuturkan bahwa negara-negara anggota juga mengakui peran kuat kepemimpinan Jepang dalam CPTPP (Live, 2018).

Dalam perumusan CPTPP, sebelas negara yang tersisa menyusun versi revisi yang mengecualikan banyak ketentuan yang sebelumnya tertera dalam TPP. Ketentuan-ketentuan tersebut ditetapkan oleh AS saat masih menjadi anggota, yang kemudian diubah atau ditanggihkan dalam penandatanganan CPTPP (Greenfield & Packham, 2018). Revisi tersebut mencakup bab investasi dan kekayaan intelektual (*intellectual property*), sehingga membatasi kemampuan investor untuk melakukan litigasi sengketa berdasarkan perjanjian dan otorisasi investasi. Selain itu, jangka waktu paten dan hak cipta obat juga dipersingkat (Center, 2017). Secara keseluruhan, revisi ini bertujuan untuk membuat CPTPP menjadi perjanjian yang lebih sederhana dengan mengurangi ruang lingkup CPTPP dibandingkan dengan TPP. Dengan begitu, semua negara anggota diharapkan dapat memperoleh manfaat yang lebih signifikan dari CPTPP (Goodman, 2018). Dalam praktiknya, CPTPP diperkirakan akan menghasilkan keuntungan sebesar 147 miliar USD untuk negara-negara anggota. Selain itu, CPTPP telah melembagakan aturan perdagangan baru untuk kesepakatan perdagangan di Asia-Pasifik. Misalnya, kerangka kerja CPTPP kemungkinan akan menjadi model untuk perjanjian perdagangan multilateral lainnya, seperti *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) yang diinisiasi oleh ASEAN. Jika terjadi, CPTPP akan berperan sebagai senjata kuat Jepang dalam ekonomi dan diplomasi global sekaligus menunjukkan peran sentral Jepang di kawasan Asia-Pasifik (Kim, 2018).

Dalam skala domestik, Jepang pada masa pemerintahan Shinzo Abe terus mendukung Perjanjian TPP yang dimodifikasi menjadi CPTPP. Dilansir dari *Japan Times* (2018), pemerintahan Abe meratifikasi CPTPP di Parlemen Nasional Jepang (Diet) dengan disahkannya perjanjian tersebut di *Lower House*—acap disebut Majelis Rendah atau setara dengan DPR di Indonesia—berkat dukungan mayoritas dari *Liberal Democratic Party* (LDP), Komeito, Partai Restorasi Jepang (*Nippon Ishin no Kai*), dan Partai Harapan (*Kibō no tō*). Demikian pula, CPTPP disahkan di *Upper House* (Majelis Tinggi) dengan suara mayoritas, didukung oleh 168 suara dan ditentang hanya oleh 69 suara (Councilors, 2018). Hingga akhirnya selesai diratifikasi pada 6 Juli 2018, pemerintah Jepang telah membuktikan komitmennya untuk tetap mempertahankan dan memperkuat TPP meskipun tanpa campur tangan AS di dalamnya.

Melawan Hegemoni China

Peran sentral Jepang dalam CPTPP juga akan membantu blok perdagangan bebas tersebut untuk menahan kebangkitan ekonomi China. Dengan kebijakan *Belt and Road Initiatives* (BRI), China berambisi untuk menjadi kekuatan ekonomi dunia dan memimpin perdagangan bebas. Terlebih, Kim (2018) menyatakan bahwa pendekatan "*America First*" AS pada era Trump dinilai semakin memperbesar peluang China untuk mengisi kekosongan kepemimpinan perdagangan bebas di Asia-Pasifik. Oleh karena itu, Jepang sebagai raksasa ekonomi di kawasan memiliki kendali besar untuk membendung ekspansi ekonomi dan perdagangan China. Meski Jepang sempat berusaha untuk membujuk AS kembali bergabung dengan TPP (Takashi, 2018) dan masih membuka peluang bagi AS di CPTPP (Aziz, 2019), apatisme AS pada forum tersebut nampaknya membuat Jepang memutuskan untuk mengambil alih kepemimpinan di CPTPP dalam bersaing dengan hegemoni China. Bukan tidak mungkin, dengan beranggotakan sebelas negara, kekuatan kolektif CPTPP dalam hal perdagangan bisa diutilisasi melalui "*strategic multilateralism*" oleh sebelas anggotanya. Dengan begitu, CPTPP berpeluang untuk menjadi kiblat baru dalam perekonomian global, khususnya di kawasan Asia Pasifik, meskipun berada di bawah kekhawatiran perekonomian China yang ekspansif.

Ditilik dari sudut pandang teoretis, strategi Jepang dalam membangun kekuatan hegemoni di kawasan sejalan dengan teori Liberal-Institusionalisme yang dipakai sebagai pisau analisis penelitian. Dengan turut mempromosikan strategi "*Free and Open Indo-Pacific*", Kementerian Luar Negeri Jepang melalui *International Cooperation Bureau* (2017) menyatakan bahwa kebijakan ini didasarkan pada tiga bidang utama, yakni perdamaian dan kemakmuran, keamanan manusia, dan diplomasi ekonomi. Pada gilirannya, peran Jepang untuk membendung hegemoni China melalui CPTPP pun akan membantu Nippon untuk membangkitkan ekonominya. Dikutip dari (Shujiro, 2021), perekonomian Jepang cukup terdampak oleh pandemi COVID-19. Kini, dengan memaksimalkan keanggotaannya di CPTPP, Jepang bisa memainkan peran penting dalam membangun, mengelola, dan meningkatkan lingkungan bisnis berbasis perdagangan bebas dan terbuka di Asia-Pasifik.

SIMPULAN

Seiring berjalannya waktu pasca hengkangnya AS dari TPP, Jepang kian memperkuat kepemimpinannya dengan mentransformasi TPP menjadi CPTPP. Peran aktif Jepang dalam CPTPP tidak terlepas dari kegigihan Perdana Menteri Jepang kala itu, Shinzo Abe, untuk mempertahankan TPP guna mengimbangi dominasi China. Mengingat Jepang sudah tidak lagi dipimpin oleh Abe, penelitian ini mendorong para peneliti lain untuk untuk menggali

lebih dalam tentang tindak lanjut Jepang dalam CPTPP pada masa kepemimpinan Fumio Kishida. Bukan tanpa alasan, mengingat politik luar negeri adalah cerminan dari politik domestik, akan selalu ada kemungkinan kebijakan Jepang berubah seiring dengan suksesi kepemimpinan di negara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Akimoto, D. (2019). Japan's Policy on the Trans-Pacific Pacific Partnership (TPP) in Light of IR Theory and Analytical Eclecticism. *Journal of International and Global Studies*, 10(2), 1-20.
- Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade. (2021). *Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership*. Barton: Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade.
- Akimoto, D. (2019). Japan's Policy on the Trans-Pacific Pacific Partnership (TPP) in Light of IR Theory and Analytical Eclecticism. *Journal of International and Global Studies*, 10(2), 1-20.
- Aziz, M. N. (2019). Strategi Jepang Dalam Mempertahankan Negosiasi Perjanjian Kerjasama Comprehensive And Progressive Agreement For Trans-Pacific Partnership Tahun 2017-2018. *Universitas Islam Indonesia*.
- Baker, P. (2017, January 23). *Trump Abandons Trans-Pacific Partnership, Obama's Signature Trade Deal*. Retrieved December 26, 2022, from The New York Times: <https://www.nytimes.com/2017/01/23/us/politics/tpp-trump-trade-nafta.html>
- Bureau, I. C. (2017, April). *Priority Policy for Development Cooperation. FY2017*. Retrieved December 27, 2022, from Ministry of Foreign Affairs of Japan: <https://www.mofa.go.jp/files/000259285.pdf>
- Center, A. T. (2017, November 14). *TPP11: Unpacking the Suspended Provisions*. Retrieved December 27, 2022, from Asian Trade Center: <https://static1.squarespace.com/static/5393d501e4b0643446abd228/t/5a0a27b1f9619a1bb0564c62/1510614967962/Policy+Brief+17-11+TPP11+Suspensions.pdf>
- Councilors, H. o. (2018, Juni 13). *Voting Result in the Plenary Session of the 196th Diet Session*. Retrieved December 15, 2022, from House of Councilors: <http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/vote/196/196-0613-v001.htm>
- Creswell, J. W. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Singapore: Sage Publications.
- González, N. C. (2019). Japan: The New Leader of Free Trade? Case-Study on Japan's Role in the CPTPP. *Digitala Vetenskapliga Arkivet*, 1-46.

- Goodman, M. P. (2018, March 8). *From TPP to CPTPP*. Retrieved December 27, 2022, from Center for Strategic & International Studies: <https://www.csis.org/analysis/tpp-cptpp>
- Greenfield, C., & Packham, C. (2018, Februari 21). *Final Version of Trans-Pacific Trade Deal Released, Rules Pushed by U.S. on Ice*. Retrieved December 15, 2022, from Reuters: <https://www.reuters.com/article/us-trade-tpp/final-version-of-trans-pacific-trade-deal-released-rules-pushed-by-u-s-on-ice-idUSKCN1G50AP>
- Hagström, L. (2015). The 'abnormal' State: Identity, Norm/Exception and Japan. *European Journal of International Relations*, 21(1), 122-145.
- Holub, M. (2018). The Trans-Pacific Partnership: Positive and Negative Impacts. *International Conference on European Integration* (pp. 456-465). Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava.
- Kim, E. (2018, May 4). *The CPTPP and Its Implications for Japan*. Retrieved December 15, 2022, from The Diplomat: <https://thediplomat.com/2018/05/the-cptpp-and-its-implications-for-japan/>
- Kunaifi, A. (2018). Rasionalitas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Menolak Bergabung Dalam Trans-Pacific Partnership (TPP). *Undergraduate (S1) Thesis*.
- Lee-Makiyama, H. (2018, August 10). *Japan, Not Europe, Is Now the Leader of Free Trade*. Retrieved December 27, 2022, from Berggruen Institute: <https://www.berggruen.org/the-worldpost/articles/japan-not-europe-is-now-the-leader-of-free-trade/>
- Live, B. (2018, December 13). *The Year Ahead - TPP11 and Japan-US Trade Negotiations / TYA*. Retrieved December 27, 2022, from Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=fbchbwC4_Ok&t=53s
- Melfianora. (2019). Penulisan Karya Tulis Ilmiah dengan Studi Literatur. *Open Science Framework*, 2.
- Mui, Y. Q. (2017, January 23). *President Trump Signs Order to Withdraw from Trans-Pacific Partnership*. Retrieved December 26, 2022, from The Washington Post: <https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2017/01/23/president-trump-signs-order-to-withdraw-from-transpacific-partnership/>
- Nakagawa, J. (2022). Japan-US Trade War Under the Trump Administration: From the US Withdrawal from the TPP to the Japan-US Trade Agreement. In K. Zeng, & W. Liang, *Research Handbook on Trade Wars* (pp. 326–340). Cheltenham and Northampton: Edward Elgar Publishing.
- Shujiro, U. (2021). Japan's Asia-Pacific Economic Strategy: Toward the Revival of the Japanese Economy. *Asia-Pacific Review*, 28(2), 35-56.

- Smith, D. (2017, January 23). *Trump Withdraws from Trans-Pacific Partnership Amid Flurry of Orders*. Retrieved December 26, 2022, from The Guardian: <https://www.theguardian.com/us-news/2017/jan/23/donald-trump-first-orders-trans-pacific-partnership-tpp>
- Solís, M., & Katada, S. N. (2015). Unlikely Pivotal States in Competitive Free Trade Agreement Diffusion: The Effect of Japan's Trans-Pacific Partnership Participation on Asia-Pacific Regional Integration. *New Political Economy*, 20(2), 155-177.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Takashi, T. (2018, February 19). *How and Why Japan Has Saved the TPP: From Trump Tower to Davos*. Retrieved December 15, 2022, from The ASAN Forum: <https://theasanforum.org/how-and-why-japan-has-saved-the-tpp-from-trump-tower-to-davos/>
- Times, J. (2018, Mei 18). *Lower House Passes Bill to Ratify Trans-Pacific Partnership Trade Deal*. Retrieved December 15, 2022, from Japan Times: https://www.japantimes.co.jp/news/2018/05/18/business/lower-house-passes-bill-ratify-trans-pacific-partnership-trade-deal/#.W_C2FGNIJMs
- Triana, D. (2019). Keluarnya Amerika Serikat Dari Kesepakatan Trans-Pacific Partnership di Masa Pemerintahan Donald Trump. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 7(4), 1713-1724.